



2024

LAPORAN MONITORING & EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA



LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

2024

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA**



KATA PENGANTAR

Purwakarta, 06 Januari 2025

Assalammu'alaikum wr.wb,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dapat selesai tepat waktu. Laporan disusun untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Pedoman penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Penerbitan laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Monitoring Kinerja ini juga memuat analisis dan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta pada periode berikutnya.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA**



H. WAHYU WIBISONO

NIP. 19670829 199503 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
• Latar Belakang	3
• Tujuan Pelaporan Kinerja	4
• Sistematika Penyajian	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
• Rencana Strategis	5
• Indikator Kinerja Utama	6
• Perjanjian Kinerja Tahun 2024	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	11
• Kriteria Ukuran Keberhasilan	11
• Rencana Aksi	12
• Capaian Kinerja	27
❖ Meningkatkan Kapasitas Dan Profesionalitas Pegawai	38
❖ Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	38
❖ Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	43
• Realisasi Anggaran	43
• Faktor Pendukung Dan Penghambat Capaian Kinerja	44
• Rekomendasi Tindak Lanjut	45
BAB IV PENUTUP	
• Kesimpulan	46
• Saran	47

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta (Selanjutnya disingkat dengan BKPSDM Kabupaten Purwakarta) memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau setiap perubahan-perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung sehingga dapat ditemukan upaya-upaya perbaikan sehingga capaian kinerja dapat dicapai lebih optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menciptakan tatalaksana pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai prasyarat bagi setiap organisasi pemerintah daerah maka dibuatlah Laporan Kinerja yang berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tujuan Pelaporan Kinerja

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta TW IV tahun 2024 adalah:

1. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
3. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

1.3 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan laporan realisasi rencana aksi capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta seperti berikut:

Bab I Pendahuluan

Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menyajikan mengenai Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta 2024-2026 & Perjanjian Kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Menggambarkan kriteria ukuran keberhasilan, rencana akdi, capaian kinerja, realisasi anggaran, menjelaskan factor pendukung dan factor penghambat capaian kinerja dan rekomendasi tindak lanjut.

Bab IV Penutup

Menyajikan penjelasan singkat mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan renstra telah mengacu pada RPD Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026, khusus terkait dengan prioritas pembangunan pada bidang tatakelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta memberikan kontribusi terhadap perwujudan visi dan misi Kabupaten Purwakarta.

VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

Visi ini mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta istimewa dalam nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif konstektual mewujudkan purwakarta istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 sila dari Pancasila.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Purwakarta maka sesuai tugas pokok dan fungsi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, memberikan kontribusi terhadap 1 misi dari 5 misi yang telah ditetapkan, yaitu:

Misi 1: "Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah"

Misi 5: "Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat"

Tujuan dari Rencana Strategis Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 adalah:

1. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur;
2. Mewujudkan tata kelola pemeritahan yang baik, bersih, efektif dan akuntabel.

Adapun sasaran dari Rencana Strategis Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 adalah:

1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalitas pegawai;

2. meningkatnya akuntabilitas publik dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Optimalisasi penerapan sistem merit.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta yang akan digunakan untuk periode tahun 2024-2026 sesuai periode renstra telah ditetapkan, tentang penetapan indikator kinerja utama badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta seperti berikut:

Tabel 2.1:
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPSDM

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE		
				2024	2025	2026
1.	Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas SDM aparatur	Sasaran 1 : Meningkatkan Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	Tingkat Profesionalitas ASN	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah
2.	Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Sasaran 2: Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A
3.			Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik
4.		Sasaran 3 : Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Kabupaten	Baik	Baik	Baik

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	Tingkat Profesionalitas ASN	Sangat Rendah
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik
3.	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Kabupaten	Baik

Tabel 2.3

Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perubahan Yang Menunjang Sasaran Strategis BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2024	Program	Indikator Program	Satuan Target	Target 2024
1. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur	1. Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	1. Tingkat Profesionalitas ASN	Sangat Rendah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam	25
					2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	1,00
					3. Persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	51,01
					4. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	persen	2,86
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2. Capaian SAKIP Perangkat Daerah 3. Indeks Kepuasan Masyarakat	A Baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan							

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2024	Program	Indikator Program	Satuan Target	Target 2024
2. yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	3. Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	4. Indeks Sistem Merit Kabupaten	Baik	Program Kepegawaian Daerah	6. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	80,88
					7. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	16,99
					8. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	49,80
					9. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	orang	34
					10. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	orang	172

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2024	Program	Indikator Program	Satuan Target	Target 2024
					11. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah 12. Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai 13. Persentase Pemberhentian ASN 14. Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa 15. Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai	orang persen persen persen persen	504 0,29 5,73 2,15 100



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

3.1 KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan demi tercapainya visi dan misi instansi pemerintah. dokumen penetapan kinerja merupakan tolok ukur perencanaan, yang menjadi materi utama untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja sebuah instansi. Gambaran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK), yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Indikator kinerja adalah tolok ukur yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu tujuan atau sasaran telah tercapai. Indikator ini sangat penting dalam berbagai bidang, mulai dari bisnis, pemerintahan, hingga individu. Dengan adanya indikator kinerja, dapat mengukur keberhasilan, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, dan membuat keputusan yang lebih baik. Indikator kinerja yang diukur terdiri dari:

- A. Indikator Kinerja Utama (IKU): merupakan indikator yang paling penting dan strategis untuk mencapai visi dan misi organisasi. IKU biasanya berfokus pada hasil akhir yang ingin dicapai.
- B. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah tolok ukur spesifik yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan strategis suatu organisasi. IKK ini seperti kompas yang memandu organisasi menuju tujuan yang telah ditetapkan yang digunakan untuk mendukung pencapaian IKU. IKK lebih spesifik dan terukur dibandingkan IKU.
- C. Indikator Kinerja Individu (IKI): merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja individu dalam mencapai tujuan organisasi.

3.2 PERUBAHAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Perubahan Rencana Aksi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tahun 2024 disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan anggaran sehingga mendorong pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang lebih efektif dan efisien. Adapun Perubahan Rencana Aksi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang dituangkan secara berkala (per bulan atau triwulan). Adapun Perubahan Rencana Aksi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA DAN JADWAL PELAKSANAAN			
						TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	Tingkat Profesionalitas ASN	Sangat Rendah	3,668,619,300					
1.1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	25 Jam						
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1%						
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	51.01%						
		Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis	2.86%						
1.1.1	Pengembangan Kompetensi Teknis			1,197,098,300					

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA DAN JADWAL PELAKSANAAN			
						TW I	TW II	TW III	TW IV
1.1.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	60 Orang	1,197,098,300	Melaksanakan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN				
1.1.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			2,471,521,000					
1.1.2.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	2,471,521,000	Melaksanakan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				
2	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Kabupaten	Predikat "Baik"	5,494,995,600					

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA DAN JADWAL PELAKSANAAN			
						TW I	TW II	TW III	TW IV
2.1	Program Kepegawaian Daerah	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	80.88%						
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16.99%						
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	49.80%						
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	34 Orang						
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	172 Orang						
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	504 Orang						
		Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	0.29%						

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA DAN JADWAL PELAKSANAAN			
						TW I	TW II	TW III	TW IV
		Persentase Pemberhentian ASN	5.73%						
		Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa	2.15%						
		Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai	100%						
2.1.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			1,919,416,000					
2.1.1.1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1,450,050,000	Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan Pengadaan PNS dan PPPK				
2.1.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	360 Dokumen	225,500,000	Melaksanakan koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN				
2.1.1.3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	109,057,000	Melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA DAN JADWAL PELAKSANAAN			
						TW I	TW II	TW III	TW IV
2.1.1.4	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	134,809,000	Melaksanakan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				
2.1.2	Mutasi dan Promosi ASN			1,762,830,000					
2.1.2.1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5 Dokumen	14,970,000	Memproses bahan usulan kenaikan pangkat ASN				
2.1.2.2	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1,747,860,000	Mengelola pengembangan karir dan promosi bagi ASN				
2.1.3	Pengembangan Kompetensi ASN			1,191,500,000					
2.1.3.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	305,000,000	Menyelenggarakan Ujian Dinas dan UPKP				
2.1.3.2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	1 Dokumen	354,250,000	Melaksanakan Pengelolaan Assesment Center				
2.1.3.3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	166,000,000	Menfasilitasi bantuan keuangan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar				

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA DAN JADWAL PELAKSANAAN			
						TW I	TW II	TW III	TW IV
2.1.3.4	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	66,250,000	Melaksanakan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				
2.1.3.5	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	60 Orang	75,000,000	Melaksanakan pembinaan terhadap ASN Fungsional				
2.1.3.6	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	25 Orang	150,000,000	Menfasilitasi Uji kompetensi dan pengembangan karir jabatan fungsional				
2.1.3.7	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	75,000,000	Melaksanakan evaluasi pengembangan Jabatan Fungsional				
2.1.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			621,249,600					
2.1.4.1	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	173,750,000	Melaksanakan penyelenggaraan seleksi PNS berprestasi				
2.1.4.2	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang	347,499,600	Melaksanakan sosialisasi E-Kinerja dan netralitas ASN				

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA DAN JADWAL PELAKSANAAN			
						TW I	TW II	TW III	TW IV
2.1.4.3	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	100,000,000	Memproses dan menyelesaikan ASN yang terkena pelanggaran disiplin				
3	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat		25,760,150,992					
3.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat "A"	25.760.150.992					
3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			141,776,000					
3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	46,697,700	Menyusun dokumen Renstra, Renja murni dan renja perubahan				
3.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	17,070,700	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA				

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA DAN JADWAL PELAKSANAAN			
						TW I	TW II	TW III	TW IV
3.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	14,297,100	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA				
3.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20,201,000	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan LAKIP				
3.1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	43,509,500	Melaksanakan monitoring Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22,183,224,720					
3.1.2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15,305,600	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA DAN JADWAL PELAKSANAAN			
						TW I	TW II	TW III	TW IV
3.1.2.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/Bulan	22,133,218,520	Membuat SPP/SPM Gaji dan Tunjangan				
3.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	14,947,200	Melaksanakan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
3.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Laporan	19,753,400	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
3.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			199,433,900					
3.1.3.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	18,330,000	Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				
3.1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	39,536,900	Melaksanakan sosialisasi / Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan				

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA DAN JADWAL PELAKSANAAN			
						TW I	TW II	TW III	TW IV
					Perundang-Undangan				
3.1.3.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	40,000,000	Memfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ASN				
3.1.3.4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket	101,567,000	Melaksanakan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya				
3.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			278,820,150					
3.1.4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	85 Unit	198,766,200	Melaksanakan Pengadaan Mebel				
3.1.4.2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	44,113,950	Melaksanakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA DAN JADWAL PELAKSANAAN			
						TW I	TW II	TW III	TW IV
3.1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	35,940,000	Melaksanakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
3.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,499,227,572					
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6,000,000	Melaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
3.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	291,966,064	Melaksanakan pembayaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
3.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1,201,261,508	Melaksanakan pembayaran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
3.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			424,220,000					

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA DAN JADWAL PELAKSANAAN			
						TW I	TW II	TW III	TW IV
3.1.6.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	200,000,000	Melaksanakan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
3.1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	40 Unit	29,660,000	Melaksanakan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
3.1.6.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	134,800,000	Melaksanakan pembayaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
3.1.6.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	59,760,000	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA DAN JADWAL PELAKSANAAN			
						TW I	TW II	TW III	TW IV
3.1.7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			14,950,400					
3.1.7.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	14,950,400	Menyusun Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				
3.1.8	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,018,498,250					
3.1.8.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59,829,000	Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
3.1.8.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	6 Paket	197,374,850	Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
3.1.8.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30,738,000	Menyediakan Peralatan Rumah Tangga				
3.1.8.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150,000,000	Menyediakan Bahan Logistik Kantor				
3.1.8.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	95,854,400	Menyediakan Barang Cetak dan Penggandaan				

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA DAN JADWAL PELAKSANAAN			
						TW I	TW II	TW III	TW IV
3.1.8.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	159,702,000	Menyediakan Bahan/Material				
3.1.8.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	190,000,000	Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
3.1.8.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	35,000,000	Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
3.1.8.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	100,000,000	Melaksanakan pengadaan /pengembangan aplikasi dan Sistem				

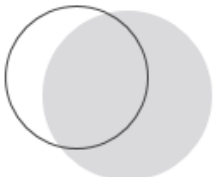
3.3 REALISASI RENCANA AKSI KINERJA

Adapun hasil Realisasi Rencana Aksi kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta untuk Triwulan IV tahun 2024 seperti tabel berikut ini:

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	Tingkat Profesionalitas ASN	Sangat Rendah	3,668,619,300	Tinggi	3,526,733,900	100%	96.13%
1.1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	25 Jam		25 Jam		100%	
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1%		1.2%		120%	
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	51.01%		68%		133%	
		Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis	2.86%		4.17%		146%	
1.1.1	Pengembangan Kompetensi Teknis			1,197,098,300		1,135,208,000		94.83%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1.1.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	60 Orang	1,197,098,300	60 Orang	1,135,208,000	100%	94.83%
1.1.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			2,471,521,000		2,391,525,900		96.76%
1.1.2.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	2,471,521,000	4 Laporan	2,391,525,900	100%	96.76%
2	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Kabupaten	Predikat "Baik"	5,494,995,600	-	4,091,294,560	0%	74.45%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
2.1	Program Kepegawaian Daerah	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	80.88%		86.48%		107%	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16.99%		24.36%		143%	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	49.80%		71.43%		143%	
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	34 Orang		29 orang		85,29%	
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	172 Orang		165 Orang		95.93%	
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	504 Orang		620 Orang		119%	
		Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	0.29%		0.26%		111%	
		Persentase Pemberhentian ASN	5.73%		5.63%		98.25%	
		Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa	2.15%		1.83%		85.12%	
		Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai	100%		100%		100%	



NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGAR AN
2.1.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			1,919,416,000		1,900,565,300		99.02%
2.1.1.1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1,450,050,000	1 Dokumen	1,444,677,550	100%	99.63%
2.1.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	360 Dokumen	225,500,000	354 Dokumen	216,052,600	98.30%	95.81%
2.1.1.3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	109,057,000	1 Dokumen	108,782,750	100%	99.75%
2.1.1.4	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	134,809,000	1 Laporan	131,052,400	100%	97.21%
2.1.2	Mutasi dan Promosi ASN			1,762,830,000		711,836,664		40.38%
2.1.2.1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5 Dokumen	14,970,000	5 Dokumen	14,970,000	100%	100.00%
2.1.2.2	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1,747,860,000	1 Dokumen	696,866,664	100%	39.87%
2.1.3	Pengembangan Kompetensi ASN			1,191,500,000		913,197,050		76.64%
2.1.3.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	305,000,000	172 Orang	285,116,450	114.67%	93.48%
2.1.3.2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	1 Dokumen	354,250,000	1 Dokumen	302,706,200	100%	85.45%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
2.1.3.3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	166,000,000	5 Orang	27,000,000	100%	16.27%
2.1.3.4	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	66,250,000	1 Dokumen	60,975,000	100%	92.04%
2.1.3.5	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	60 Orang	75,000,000	60 Orang	66,590,000	100%	88.79%
2.1.3.6	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	25 Orang	150,000,000	25 Orang	104,067,400	100%	69.38%
2.1.3.7	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	66,742,000	100%	88.99%
2.1.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			621,249,600		565,695,546		91.06%
2.1.4.1	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	173,750,000	1 Laporan	171,701,746	100%	98.82%
2.1.4.2	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang	347,499,600	100 Orang	315,652,000	100%	90.84%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGAR AN
2.1.4.3	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	78,341,800	100%	78.34%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat		25,760,150,992		14,040,231,755		54.50%
3.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat "A"	25,760,150,992	Predikat "A"	14,040,231,755	100%	54.50%
3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			141,776,000		83,454,051		58.86%
3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	46,697,700	3 Dokumen	26,891,700	100%	57.59%
3.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	17,070,700	1 Dokumen	11,216,000	100%	65.70%
3.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	14,297,100	1 Dokumen	9,150,100	100%	64.00%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
3.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20,201,000	1 Laporan	14,201,751	100%	70.30%
3.1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	43,509,500	4 Laporan	21,994,500	100%	50.55%
3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			25,377,121,438		8,406,051,855		33.12%
3.1.2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15,305,600	1 Laporan	15,005,600	100%	98.04%
3.1.2.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/Bulan	22,133,218,520	57 Orang/Bulan	10,761,698,621	91%	48.62%
3.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	14,947,200	2 Dokumen	8,922,000	100%	59.69%
3.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan	19,753,400	4 Laporan	7,928,100	100%	40.14%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGAR AN
		Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD						
3.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			199,433,900		176,183,500		88.34%
3.1.3.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	18,330,000	1 Dokumen	15,181,000	100%	82.82%
3.1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	39,536,900	40 Orang	29,970,000	100%	75.80%
3.1.3.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	40,000,000	30 Orang	29,945,000	120%	74.86%
3.1.3.4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket	101,567,000	1 Paket	101,087,500	100%	99.93%
3.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			278,820,150		278,611,200		99.93%
3.1.4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	85 Unit	198,766,200	85 Unit	198,661,200	100%	100.00%
3.1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	35,940,000	1 Unit	35,940,000	100%	100.00%
3.1.4.3	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	44,010,000	1 Unit	44,010,000	100%	99.76%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGAR AN
		Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						
3.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,499,227,572		1,283,450,788		85.61%
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6,000,000	1 Laporan	6,000,000	100%	100%
3.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	291,966,064	4 Laporan	228,299,459	100%	65.48%
3.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1,201,261,508	10 Laporan	1,049,151,329	100%	65.48%
3.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			424,220,000		405,513,700		95.59%
3.1.6.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	200,000,000	2 Unit	199,626,000	100%	99.81%
3.1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	40 Unit	29,660,000	40 Unit	25,860,000	100%	87.19%
3.1.6.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	134,800,000	14 Unit	120,519,700	64%	89.41%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGAR AN
	atau Kendaraan Dinas Jabatan							
3.1.6.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	59,760,000	85 Unit	59,508,000	100%	99.58%
3.1.7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			14,950,400		12,850,400		85.95%
3.1.7.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	14,950,400	1 Dokumen	14,950,400	100%	100.00%
3.1.8	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,018,498,250		1,004,513,798		98.63%
3.1.8.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59,829,000	1 Paket	59,819,000	100%	99.98%
3.1.8.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	6 Paket	197,374,850	6 Paket	196,758,850	100%	99.69%
3.1.8.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30,738,000	1 Paket	30,738,000	100%	100.00%
3.1.8.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150,000,000	1 Paket	145,047,000	100%	96.70%
3.1.8.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	95,854,400	2 Paket	95,845,000	100%	99.99%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
3.1.8.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	159,702,000	2 Paket	159,691,000	100%	99.99%
3.1.8.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	190,000,000	12 Laporan	189,911,945	100%	99.955%
3.1.8.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	35,000,000	2 Dokumen	27,136,000	100%	77.53%
3.1.8.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	100,000,000	3 Dokumen	99,567,000	100%	99.57%



3.3.1 Meningkatnya Kapasitas Dan Profesionalitas Pegawai

Sasaran meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai diukur menggunakan capaian kategori Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) dengan target “**Sangat Rendah**” atau “**51-60**” dengan realisasi “**Tinggi**” atau “**85,31**”. Hal ini disebabkan telah dilaksanakan update data kepegawaian, baik itu kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Program pada Sasaran Strategis ini adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Capaian kinerja triwulan IV tahun 2024 pada program ini adalah persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dengan target **120%** dan realisasi sebesar **1,2%** atau “**Melampaui**”, hal ini terlihat dari jumlah pengurusan Ijin Belajar sebanyak 85 orang, Tugas Belajar 41 orang dan Surat Keterangan Belajar 164 orang. Adapun untuk indikator Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan, Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis belum ada realisasi sampai dengan triwulan IV ini.

Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023
Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN

Instansi	Jenis Pegawai	Jumlah Pegawai yang Diukur	Rata-Rata					Kategori
			Dimensi Kualifikasi	Dimensi Kompetensi	Dimensi Kinerja	Dimensi Disiplin	Nilai	
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	PNS	28.572	21,46	37,55	27,81	5,00	91,82	Sangat Tinggi
	PPPK	11.944	20,05	32,57	27,64	5,00	85,26	Tinggi
	ASN	40.516	21,04	36,08	27,76	5,00	89,89	Tinggi
Pemerintah Kab. Majalengka	PNS	8.263	21,15	35,79	26,35	5,00	88,29	Tinggi
	PPPK	2.163	24,94	20,12	25,08	5,00	75,13	Sedang
	ASN	10.426	21,94	32,54	26,09	5,00	85,56	Tinggi
Pemerintah Kab. Purwakarta	PNS	6.097	20,62	34,47	25,31	5,00	85,39	Tinggi
	PPPK	49	25,00	20,00	25,00	5,00	75,00	Sedang
	ASN	6.146	20,65	34,35	25,31	5,00	85,31	Tinggi

Gambar 3.1 Capaian IPASN

3.3.2 Optimalisasi Penerapan Sistem Merit

Sasaran meningkatnya optimalisasi penerapan sistem merit diukur menggunakan capaian indeks Sistem Merit dengan target predikat “**Baik**”. Program pada Sasaran Strategis ini adalah Program Kepegawaian Daerah. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) antara lain:

- Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%)

Capaian Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar pada tahun 2024 mencapai 107% atau melampaui dengan realisasi sebesar 86,48% dari target 80,88%.

- Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Capaian Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) mencapai 143% atau Melampaui, dengan realisasi sebesar 24,36% dari

target 16,99%. Jumlah ASN fungsional diluar Tenaga kesehatan & Tenaga guru sejumlah 602 orang, dengan jumlah keseluruhan pegawai 7782 orang. Terdapat penambahan yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu, hal ini disebabkan sebanyak 21 orang lulusan PKN STAN, 6 orang lulusan IPDN dan 1.351 orang yang terdiri dari 992 orang tenaga guru, 300 orang tenaga kesehatan dan 59 orang tenaga teknis yang dilantik sebagai PPPK Kabupaten Purwakarta Formasi Tahun 2023.

- Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Capaian Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) mencapai 143% atau Melampaui, dengan realisasi sebesar 71,43% dari target 49,80%. Jumlah ASN fungsional yg bersertifikat kompetensi terdapat 430 orang diluar Tenaga guru dan Tenaga kesehatan sejumlah 602 orang.

- Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Capaian Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) mencapai 143% atau Melampaui, dengan realisasi sebesar 71,43% dari target 49,80%. Jumlah ASN Fungsional yang bersertifikat kompetensi terdapat 430 orang diluar tenaga guru dan Kesehatan sejumlah 602 orang.

- Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah

Capaian Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah mencapai 95,93% atau Sangat Tinggi. Pertanggal 31 Desember 2024 jumlah Jabatan Administrasi yang terisi sebanyak 165 posisi dari jumlah keseluruhan 172 posisi. Berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta No.821.29/Kep.373-BKPSDM/2024, sebanyak 33 Pejabat Administrator yang mendapatkan Promosi, mutasi dan rotasi sebagai bentuk upaya memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kompetensi serta menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat agar organisasi dapat mencapai tujuannya dengan lebih efisien dan efektif.

- Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah
Capaian Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah mencapai 119% atau Melampaui dengan jumlah 602 Orang dari target 504 orang. Terdapat penambahan dari dilantiknya 21 orang Lulusan PKN STAN, 6 Orang lulusan IPDN dan 59 tenaga teknis PPPK Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai
Capaian Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai mencapai 111,54% atau Melampaui, dengan realisasi 0,26% dari target 0,29%. Penyelesaian Hukuman Disiplin Tahun 2024 terdiri dari 8 Kasus ringan, 2 Kasus berat.
- Persentase Pemberhentian ASN
Capaian Persentase Pemberhentian ASN mencapai 98,25% atau Sangat Tinggi, dengan realisasi 5,63% dari target 5,73%.
- Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa
Capaian Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa pada Tahun 2024 mencapai 85,12% atau Tinggi, dengan realisasi 1,83% dari target 2,15%. Jumlah pegawai berprestasi pada tahun 2024 berjumlah 5 orang, Pegawai yang mendapatkan Satya Lencana Karya Satya sebanyak 96 orang dan 18 orang masih dalam proses, dan pemberian penghargaan kepada 15 pengelola kepegawaian terbaik.
- Persentase Pengadaan ASN sesuai formasi pegawai
Capaian Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai mencapai 100% atau sangat tinggi. Formasi CPNS Tahun 2024 sebanyak 125 Jabatan, yang diikuti 2.657 Pelamar dengan status MS dan 402 dengan status TMS. Formasi PPPK Tahun 2024 sebanyak 535 Jabatan yang diikuti 4.013 Pelamar.



Gambar 3.2 Pelantikan & Pengambilan Janji/Sumpah
P P P K Kabupaten Purwakarta Formasi Tahun 2023



Gambar 3.3 Bimtek Pengelolaan Kinerja ASN



Gambar 3.4 Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Ijazah Tahun 2024



Gambar 3.5 Pelaksanaan Assesment Pegawai

3.3.3 Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas publik dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur menggunakan 2 indikator, antara lain:

- Capaian SAKIP Perangkat Daerah dengan target Predikat “**Memuaskan**” atau Kategori “**A**”, dengan realisasi predikat “Memuaskan” pada kategori “A” dan nilai 84,40.
- Indeks Kepuasan Masyarakat pada triwulan IV tahun 2024 adalah 89,57 atau “**Sangat Baik**”.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan alokasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tahun 2024 semua bersumber pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta. Anggaran BKPSDM Kabupaten Purwakarta berdasarkan pagu awal adalah sebesar Rp. 34.959.705.892,00-. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp. 21.658.260.215,00- atau sebesar 62,02%. Kecilnya persentase penyerapan anggaran BKPSDM Kabupaten Purwakarta sampai dengan triwulan IV tahun 2024 disebabkan adanya efisiensi anggaran di beberapa sub kegiatan dan

sebagian besar kegiatan kontraktual masih dalam proses pelaksanaan sehingga belum ada realisasi pembayaran untuk kegiatan tersebut. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.760.150.992,00- dengan realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp. 14.040.231.755,00- atau 54,50% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 11.719.919.237,00-.
2. **Program Kepegawaian Daerah**, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.494.995.600 dengan realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2024 Rp. 4.091.294.560 atau 74,45% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 1.403.701.040,00-.
3. **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.668.619.300,00- dengan realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp. 3.526.733.900,00- atau 96,13% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 141.885.400,00-.

3.5 FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT CAPAIAN KINERJA

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada BKPSDM Kabupaten Purwakarta tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap realisasi capaian kinerja yang telah dicapai. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambatnya adalah sebagai berikut:

A. Faktor Pendukung

Koordinasi yang baik antara bidang dilingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta yang dikoordinasikan oleh sekretariat dalam hal ini sub bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan dalam hal pengawalan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen renja dan dalam hal pengawalan target anggaran program/kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan.

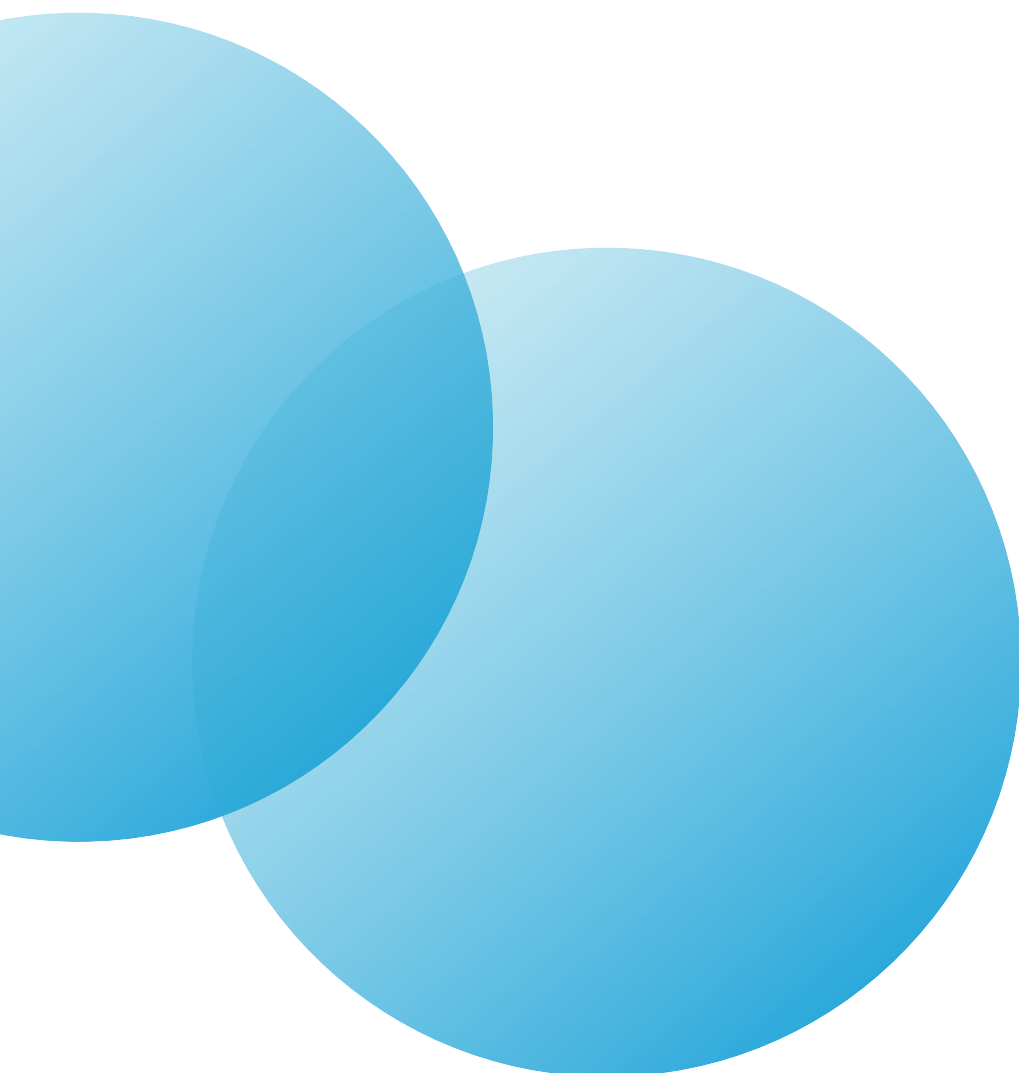
B. Faktor Penghambat

1. Adanya efisiensi anggaran di beberapa sub kegiatan.
2. Penyesuaian pembelian barang/jasa melalui e-purchasing/e-katalog.
3. Adanya rasionalisasi anggaran yang berdampak terhadap target kinerja beberapa sub kegiatan yang tidak dapat di penuhi.

3.6 REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Sehubungan dengan adanya permasalahan/faktor penghambat yang masih ditemui, maka perlu dilakukannya langkah-langkah antara lain:

- a. Evaluasi Kembali Efisiensi Anggaran ditahun berikutnya, dengan cara:
 - Lakukan evaluasi mendalam terhadap penggunaan anggaran pada setiap sasaran. Identifikasi pos-pos pengeluaran yang kurang efisien dan cari alternatif yang lebih hemat biaya.
 - Terapkan prinsip *value for money* dalam setiap pengeluaran anggaran. Pastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal.
- b. Lakukan evaluasi terhadap implementasi sistem merit. Identifikasi kendala dan susun rencana aksi perbaikan.
- c. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang ditetapkan.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta berusaha semaksimal mungkin untuk meraih tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut secara optimal meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan. Namun demikian, segenap elemen unit organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tetap berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan berbagai strategi pemecahan permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2024.

Dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, memperoleh kategori capaian Sangat Tinggi dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 118,87%

Disamping itu bila dilihat dari akuntabilitas kinerja keuangan untuk triwulan IV tahun 2024, realisasi total belanja dari dana APBD Kabupaten Purwakarta adalah sebesar Rp. 21.658.260.215,00- (62,02%) dari target total belanja yang ditetapkan sebesar Rp. 34.923.765.892,00-.

4.2 Saran

Dalam upaya menjaga konsistensi penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka BKPSDM Kabupaten Purwakarta merumuskan beberapa strategi atas kendala yang dihadapi dalam bentuk saran melaksanakan evaluasi kembali atas Efisiensi Anggaran dan evaluasi implementasi Sistem Merit secara berkala.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

- a. Evaluasi Kembali Efisiensi Anggaran ditahun berikutnya, dengan cara:
 - Lakukan evaluasi mendalam terhadap penggunaan anggaran pada setiap sasaran. Identifikasi pos-pos pengeluaran yang kurang efisien dan cari alternatif yang lebih hemat biaya.
 - Terapkan prinsip *value for money* dalam setiap pengeluaran anggaran. Pastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal.
- b. Lakukan evaluasi terhadap implementasi sistem merit. Identifikasi kendala dan susun rencana aksi perbaikan.
- c. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang ditetapkan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Veteran Komplek Griya Hegarmanah Ciseureuh Purwakarta (41118)
Telepon (0264) 201019, Faksimili. (0264) 201019, Posel : bkpsdmpwk@gmail.com
Laman : bkpsdm.purwakartakab.go.id

NOTULEN RAPAT

Rapat : Rapat Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Kinerja Dan Realisasi
Anggaran Triwulan IV tahun 2024
Hari/Tanggal : Kamis / 02 Januari 2025
Waktu : 13.00 s/d selesai
Tempat : Aula BKPSDM Kabupaten Purwakarta

Peserta Rapat

Ketua : Kepala BKPSDM Kabupaten Purwakarta
Moderator : Sekretaris BKPSDM Kabupaten Purwakarta
Anggota : 1. Kepala Bidang
2. Kepala Sub Bagian
3. Pejabat Fungsional

Kegiatan Rapat:

1. Pembukaan : Rapat dibuka oleh kepala BKPSDM Kabupaten Purwakarta sekaligus memberikan arahan kepada peserta rapat terkait dengan pencapaian program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2024.
2. Pembahasan :
 - a. Laporan realisasi anggaran pada triwulan IV Tahun 2024 yaitu Rp. 21.658.260.215,00- atau 62,02% dari pagu anggaran Rp. 34.923.765.892,00-. Rendahnya capaian ini dikarenakan tidak terserapnya anggaran pembayaran gaji Calon ASN pengadaan formasi tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000.000, hal ini disebabkan pelaksanaan seleksi CASN Tahun 2024 sampai saat ini masih berlangsung.
 - b. Sasaran Strategis yang ditetapkan sebanyak 3 Sasaran dengan 4 Indikator Kinerja Utama. Dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta mendapatkan kategori Melampaui dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 118,87%. Capaian Indikator Kinerja Kunci sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 mencapai 112,56%.

- c. Kepala Badan mengucapkan terima kasih atas capaian kinerja dari semua Bidang. Secara umum kinerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta dalam pencapaian sasaran strategis telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dapat disimpulkan kinerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta masuk dalam kategori Sangat Berhasil.
- d. Sekretariat Badan memaparkan capaian anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dengan realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp. 14.040.231.755,00- atau 54,50% dari pagu anggaran sebesar Rp. 25.760.150.992,00-. Capaian Kinerja (IKK) sudah mencapai 100% dengan capaian SAKIP predikat A.
- e. Sekretariat Badan juga mengingatkan agar bidang-bidang segera menyelesaikan asistensi dan terus berkoordinasi dengan bagian PKP.
- f. Kepala Bidang Pengadaan memaparkan capaian anggaran 99,45,7%. Capaian Kinerja (IKK) sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100%. Pelaksanaan pendaftaran PPPK tahap 2 masih berlangsung dan ada perpanjangan waktu. Masih banyak tenaga honorer dan THL yang belum mendaftar.
- g. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia memaparkan capaian anggaran sebesar Rp 5.136.797.614,- atau 77,8%% dengan pagu anggaran 6.607.979.300. Saat ini bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sedang mempersiapkan pelantikan untuk Jabatan Fungsional Tertentu.
- h. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan memaparkan capaian anggaran sebesar Rp. 781.748.146,- atau 92,32% dengan pagu anggaran 846.749.600

Dokumentasi :





Notulis

DEWI PROKLAMASI, SE, MM.
NIP. 19770817 200901 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Veteran Komplek Griya Hegarmanah Ciseureuh Purwakarta (41118)
Telepon (0264) 201019, Faksimili. (0264) 201019, Posel : bkpsdmpwk@gmail.com
Laman : bkpsdm.purwakartakab.go.id

DAFTAR HADIR

Acara : Rapat Monitoring & Evaluasi Kinerja, Anggaran & Manajemen Risiko Triwulan IV Tahun 2024
Hari/Tanggal : Kamis, 02 Januari 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Aula BKPSDM Kab. Purwakarta

NO	NAMA	JABATAN/PD	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	Wicak	K BKPSDM	L	
2	Acep Yuki Mulya	KABID PEMBINAAN	L	
3				
4	CIKA SISKAWATI	KABID PENGELOLAAN	P	
5	Dewi. P	Kanbag PKP	P	
6	Dipn. Sutemawijaya	Kabid. Binasdm	L	
7	Analis/Iwan	Analis SDMA	L	
8	Mardiah A	Analis SDMA	P	
9	Dwi Shoupu	Analis SDMA	L	
10	DEVI NORIANH	Analis SDMA	P	
11	DEDE	ANALIS SDMA	L	
12	Medi. P	Katek	L	
13	Yusup Ismail	ANALIS SDMA	L	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				